



# RAPAT PENGARAHAN REFORMASI BIROKRASI

Mahkamah Agung RI



# REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG

BUKAN HANYA SEKEDAR :

KEHADIRAN/ABSENSI



TUNJANGAN KINERJA



# SASARAN REFORMASI BIROKRASI

## Sesuai Roadmap RB 2015-2019:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas





# ROADMAP- Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:

**TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI  
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL  
BIROKRASI YANG MENGGUNAKAN SELURUH SUMBER DAYA YANG  
DIMILIKI SECARA EFISIEN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK**

**2015**

1. Tersusunnya penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi
2. Tersusunnya penguatan kebijakan pengawasan
3. Tersusunnya kebijakan pengembangan sistem pengaduan nasional
4. Tersusunnya kebijakan penguatan sistem Akuntabilitas

**2016**

1. Meningkatnya internalisasi sistem nilai dan integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional

**2017**

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya independensi APIP
8. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya sinergitas sistem pelaporan;

**2018**

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya intensitas independensi APIP
8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah
10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan;

**2019**

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya intensitas independensi APIP
8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah
10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan;
11. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja;
12. Meningkatnya akuntabilitas publik;
13. Terinternalisasinya Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Integritas pada Instansi Pemerintah
14. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktek KKN
15. Meningkatnya kontribusi setiap instansi pemerintah pada peningkatan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan

**KONDISI SAAT INI**

**KONDISI YANG DIHARAPKAN**

# ROADMAP- Menuju Birokrasi yang Efektif dan Efisien:

TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI  
BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN  
BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS TINGGI, BERSIH DARI  
PRAKTEK KKN, DAN AKUNTABEL PADA PUBLIK

2015

1. Tersusunnya kebijakan penguatan Reformasi Birokrasi
2. Tersusunnya design kelembagaan K/LPNK/LNS dan pemda
3. Tersusunnya kebijakan implementasi UU Administrasi pemerintahan
4. Tersusunnya kebijakan penyederhanaan bisnis proses
5. Tersusunnya kebijakan penguatan e-government
6. Tersusunnya penguatan sistem pengadaan secara elektronik
7. Tersusunnya berbagai kebijakan pelaksanaan UU ASN
8. Tersusunnya penguatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan

2016

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Meningkatnya efisiensi
4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
7. Meningkatnya kemampuan unit pengelola SDM untuk menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit
8. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
9. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan
10. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan

2017

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Meningkatnya efisiensi
4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya sinergi fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah
6. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
9. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
10. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan
12. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

2018

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatnya penggunaan teknologi
7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
9. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
10. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan
12. Meningkatnya kualitas kebijakan publik
13. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

2019

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatnya efektivitas tata hubungan antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
7. Meningkatnya penggunaan teknologi
8. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
9. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
10. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
11. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
12. Meningkatnya integritas aparatur
13. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan publik
14. Meningkatnya kualitas kebijakan publik
15. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

# ROADMAP- Menuju Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas

TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI  
BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS  
BIROKRASI YANG MAMPU MEMENUHI PUBLIC NEEDS

2015

1. Meningkatnya kualitas implementasi UU 25/2009
2. Meningkatnya modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik

2016

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

2017

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
9. Meningkatnya investasi dalam negeri.

2018

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
9. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia
10. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri.

2019

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kesadaran publik terhadap kualitas pelayanan
8. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
10. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia
11. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang setara dengan negara-negara maju di Asia
13. Menurunnya kesenjangan kualitas pelayanan antar daerah dan antar golongan masyarakat
14. Terwujudnya budaya pelayanan prima
15. Meningkatnya daya saing nasional

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

# KENAPA HARUS ADA ROADMAP?

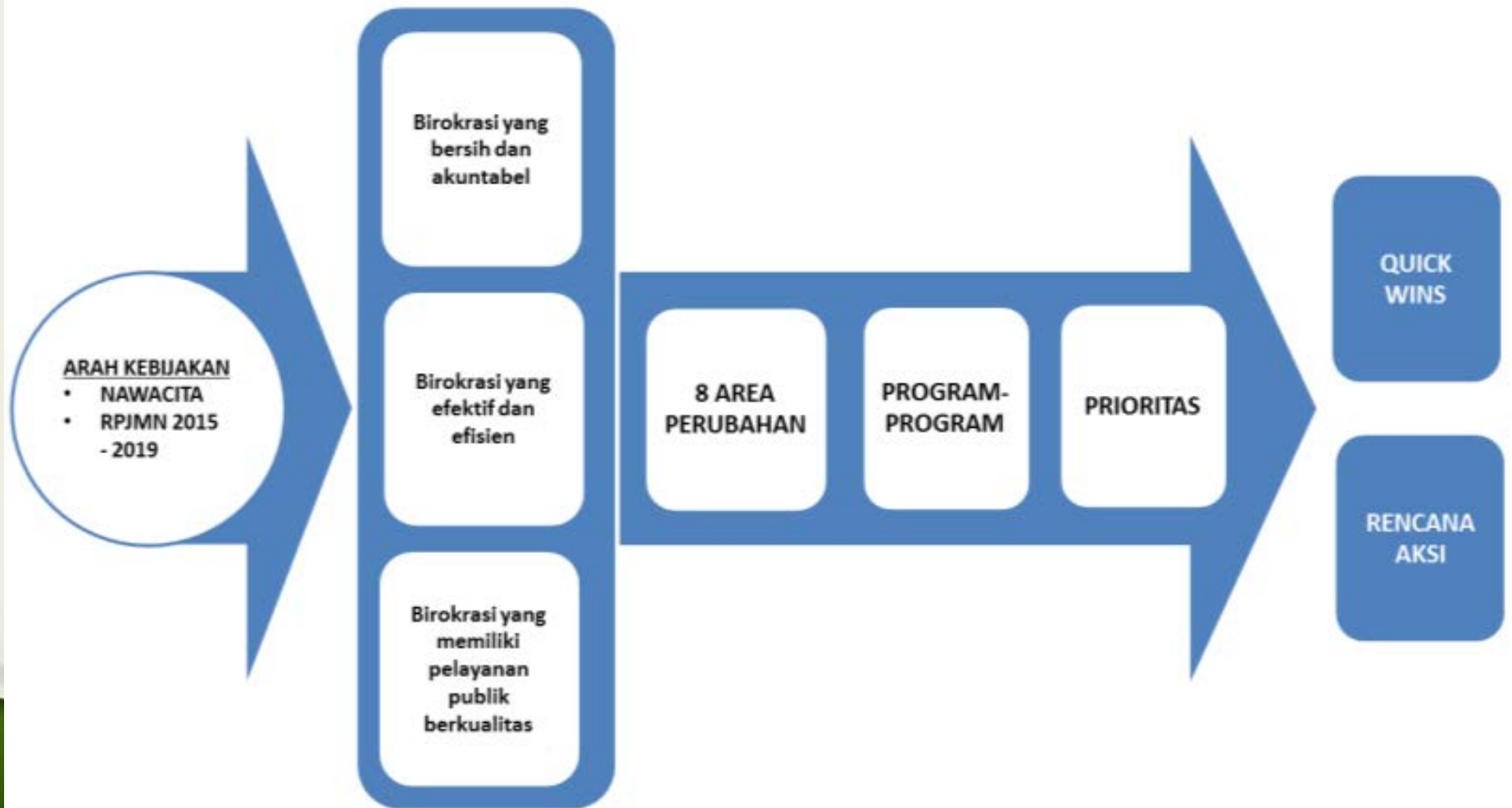




1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya.
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan.
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia*



# KERANGKA ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP RB



# QUICK WINS MA RI TAHUN 2008

1. TRANSPARANSI PUTUSAN/PERADILAN
2. PENGEMBANGAN IT
3. IMPLEMENTASI KODE ETIK HAKIM
4. PNBP
5. ANALISA PEKERJAAN, EVALUASI PEKERJAAN DAN REMUNERASI (TUNJANGAN KINERJA)



# KEWAJIBAN UNIT KERJA DALAM MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI

**Sesuai dengan Permenpan RB No. 11 Tahun 2015:**

1. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;
2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka unit kerja bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor Quick Wins;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;



# HASIL PMPRB MA RI 2015

NO	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>				
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,31	3,85	77,04%
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09	3,75	75,00%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,64	3,68	61,28%
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,17	3,63	72,65%
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,34	13,08	87,22%
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	4,48	74,60%
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	3,99	8,73	72,73%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,54	4,86	80,97%
	<b>Subtotal Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>26,73</b>	<b>46,06</b>	<b>76,77%</b>



NO	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
<b>B</b>	<b>HASIL</b>				
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,09	13,72	68,61%
2.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	7,66	76,60%
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,50	6,00	60,00%
	<b>Sub Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>21,59</b>	<b>27,38</b>	<b>68,45%</b>
	<b>Sub Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>26,73</b>	<b>46,06</b>	<b>76,77%</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100,00</b>	<b>48,33</b>	<b>73,44</b>	<b>73,44%</b>

Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI = **73,44**

Predikat = **BB (Sangat Baik)**



**PROSENTASE PENYERAPAN TA 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>	<b>SISA</b>	<b>% SISA</b>
1	Pengadilan Militer II - 08 Jakarta	4.501.024.000	3.606.695.706	80,13%	894.328.294	19,87%
2	Pengadilan Agama Cimahi	9.424.288.000	7.152.651.143	75,90%	2.271.636.857	24,10%
3	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	20.443.532.000	14.840.897.636	72,59%	5.602.634.364	27,41%
4	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	10.528.806.000	7.576.616.834	71,96%	2.952.189.166	28,04%
5	Pengadilan Negeri Cianjur	5.039.677.000	3.441.397.504	68,29%	1.598.279.496	31,71%
6	Pengadilan Agama Jakarta Barat	9.008.268.000	6.020.340.243	66,83%	2.987.927.757	33,17%
7	Pengadilan Negeri Serang	13.329.983.000	8.851.001.111	66,40%	4.478.981.889	33,60%
8	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	5.958.757.000	3.936.491.969	66,06%	2.022.265.031	33,94%
9	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	10.760.502.000	7.076.713.064	65,77%	3.683.788.936	34,23%
10	Pengadilan Negeri Purwakarta	6.867.347.000	4.444.488.025	64,72%	2.422.858.975	35,28%
11	Pengadilan Negeri Tangerang	18.749.329.000	12.026.318.826	64,14%	6.723.010.174	35,86%
12	Pengadilan Negeri Bekasi	21.737.175.000	13.800.618.430	63,49%	7.936.556.570	36,51%
13	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	7.136.289.000	4.518.300.910	63,31%	2.617.988.090	36,69%
14	Pengadilan Agama Tangerang	5.966.057.000	3.759.864.030	63,02%	2.206.192.970	36,98%
15	Pengadilan Agama Jakarta Utara	8.107.158.000	5.081.817.569	62,68%	3.025.340.431	37,32%
16	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	37.010.041.000	22.995.249.587	62,13%	14.014.791.413	37,87%
17	Pengadilan Negeri Bogor	9.354.210.000	5.778.507.466	61,77%	3.575.702.534	38,23%
18	Pengadilan Negeri Bandung	31.597.357.000	19.203.841.021	60,78%	12.393.515.979	39,22%
19	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	9.460.969.000	5.734.086.600	60,61%	3.726.882.400	39,39%
20	Pengadilan Agama Karawang	8.220.136.000	4.906.456.402	59,69%	3.313.679.598	40,31%
21	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	24.428.913.000	14.549.411.536	59,56%	9.879.501.464	40,44%
22	Pengadilan Agama Jakarta Timur	15.910.135.000	9.434.609.498	59,30%	6.475.525.502	40,70%
23	Pengadilan Agama Cianjur	6.325.393.000	3.662.539.050	57,90%	2.662.853.950	42,10%
24	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	29.452.369.000	16.988.338.586	57,68%	12.464.030.414	42,32%
25	Pengadilan Agama Tigaraksa	7.917.924.000	4.556.640.917	57,55%	3.361.283.083	42,45%
26	Pengadilan Agama Cibinong	7.112.017.000	4.001.932.834	56,27%	3.110.084.166	43,73%
27	Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta	6.186.418.000	3.401.979.684	54,99%	2.784.438.316	45,01%
28	Pengadilan Negeri Karawang	7.923.828.000	4.305.070.120	54,33%	3.618.757.880	45,67%
29	Pengadilan Negeri Depok	10.112.246.000	5.453.341.674	53,93%	4.658.904.326	46,07%
30	Pengadilan Militer Utama	4.288.761.000	2.309.568.057	53,85%	1.979.192.943	46,15%
31	Pengadilan Tinggi Jakarta	34.251.328.000	18.358.455.467	53,60%	15.892.872.533	46,40%
32	Pengadilan Agama Bekasi	7.533.739.000	3.970.823.125	52,71%	3.562.915.875	47,29%
33	Pengadilan Negeri Cibinong	11.404.988.000	5.981.560.687	52,45%	5.423.427.313	47,55%
34	Pengadilan Agama Purwakarta	5.505.737.000	2.859.564.224	51,94%	2.646.172.776	48,06%
35	Pengadilan Agama Bogor	5.995.859.000	3.113.059.147	51,92%	2.882.799.853	48,08%
36	Pengadilan Agama Cikarang	5.942.149.000	3.079.060.654	51,82%	2.863.088.346	48,18%
37	Pengadilan Agama Depok	8.156.919.000	3.797.504.739	46,56%	4.359.414.261	53,44%
38	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	42.046.317.000	16.481.292.868	39,20%	25.565.024.132	60,80%
39	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	58.458.312.000	16.268.263.936	27,83%	42.190.048.064	72,17%
40	Pengadilan Agama Serang	13.194.634.000	3.095.135.202	23,46%	10.099.498.798	76,54%

Kadaan Perkara pada SIPP pertanggal 12 July 2016 Pukul 11:00 WIB

Note: SIPP versi terakhir 3.1.3

NO	NAMA SATKER	sisa Tahun Lalu	Masuk	Minutasi	sisa Tahun ini	presentase	versi	sinkron terakhir
1	Pengadilan Militer Utama	0	0	0	0	0	3.1.3	07/12/2016 7:13
2	Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta	0	1	0	1	0	3.1.3	07/12/2016 7:13
3	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	0	3	0	3	0	3.1.3	07/12/2016 7:13
4	Pengadilan Agama Bekasi	0			0	0		
5	Pengadilan Agama Depok	2790	1808	4	4594	0,09	3.1.1	22/06/2016 19:07
6	Pengadilan Militer II - 08 Jakarta	821	169	19	971	1,92	3.1.3	29/06/2016 07:53
7	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	470	196	46	620	6,91	3.1.3	07/12/2016 7:13
8	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	4651	286	498	4439	10,09		06/07/2016 7:47
9	Pengadilan Agama Serang	1376	1194	346	2224	13,46	3.1.3	28/06/2016 16:55
10	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	960	333	179	1114	13,84		07/12/2016 1:06
11	Pengadilan Agama Purwakarta	228	693	137	784	14,88	3.1.3	27/06/2016 13:03
12	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	16	196	46	619	21,7	3.1.3	07/12/2016 7:13
13	Pengadilan Agama Cibinong	1034	2309	890	2453	26,62	3.1.3	20/06/2016 19:35
14	Pengadilan Agama Bogor	318	845	320	843	27,52	3.1.3	28/06/2016 19:18
15	Pengadilan Agama Cikarang	482	1208	469	1221	27,75	3.1.1-1	28/06/2016 12:11
16	Pengadilan Negeri Tangerang	1524	2088	1070	2542	29,62	3.1.3	29/06/2016 17:42
17	Pengadilan Agama Tangerang	853	1301	655	1499	30,41	3.1.3	07/12/2016 9:04
18	Pengadilan Agama Jakarta Barat	718	1453	691	1480	31,83	3.1.2	07/12/2016 8:16
19	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1064	1468	930	1602	36,73	3.1.3	27/06/2016 22:29
20	Pengadilan Agama Tigaraksa	1128	2438	1369	2197	38,39	3.1.3	29/06/2016 16:02
21	Pengadilan Agama Jakarta Timur	1106	2324	1355	2075	39,5	3.1.3	28/06/2016 10:43
22	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1096	1947	1232	1811	40,49	3.1.3	07/12/2016 6:18
23	Pengadilan Tinggi Jakarta	84	366	184	380	40,89	3.1.3	07/12/2016 7:13
24	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	1224	1652	1359	1517	47,25	3.1.3	07/12/2016 6:43



25	Pengadilan Agama Jakarta Utara	506	853	652	707	47,98	3.1.3	29/06/2016 11:08
26	Pengadilan Agama Karawang	431	1597	981	1047	48,37	3.1.3	07/12/2016 9:25
27	Pengadilan Negeri Bekasi	1018	1626	1384	1260	52,34	3.1.3	07/11/2016 21:58
28	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	1157	2117	1738	1536	53,08	3.1.3	29/06/2016 13:46
29	Pengadilan Negeri Serang	426	811	661	576	53,44	3.1.3	07/12/2016 9:00
30	Pengadilan Negeri Depok	397	659	566	490	53,6	3.1.3	29/06/2016 17:30
31	Pengadilan Agama Cimahi	1299	6347	4238	3408	55,43	3.1.3	07/12/2016 3:19
32	Pengadilan Negeri Cibinong	518	931	811	638	55,97	3.1.3	07/12/2016 3:10
33	Pengadilan Negeri Bandung	805	1491	1342	954	58,45	3.1.3	07/11/2016 21:11
34	Pengadilan Negeri Karawang	188	432	363	257	58,55	3.1.3	29/06/2016 15:47
35	Pengadilan Negeri Cianjur	129	317	262	184	58,74	3.1.3	07/12/2016 9:43
36	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	27	23	30	20	60,00	3.1.3	07/11/2016 14:21
37	Pengadilan Negeri Bogor	201	358	364	195	65,12	3.1.3	07/12/2016 7:16
38	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	399	747	775	371	67,63	3.1.3	30/06/2016 01:43
39	Pengadilan Negeri Purwakarta	64	322	262	124	67,88	3.1.3	30/06/2016 05:06
40	Pengadilan Agama Cianjur	371	1969	1700	640	72,65	3.1.1	29/06/2016 18:02



Terima Kasih

